

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat pada masyarakat telah berdampak signifikan, termasuk di tingkat desa. Peningkatan aksesibilitas dan penggunaan teknologi informasi oleh masyarakat telah mendorong pemerintah untuk beradaptasi guna meningkatkan tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien (Baskoro dkk., 2023). Sehingga desa-desa perlu punya kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mempunyai konsep untuk mewujudkannya adalah dengan desa cerdas (Damarjati, 2021).

Desa cerdas atau biasa disebut dengan *smart village* merupakan konsep yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan pelayanan yang lebih baik bagi warganya (Herdiana, 2019). *Smart village* ini merupakan konsep turunan dari *smart city* yang memiliki cakupan luas. Perbedaannya pada lokasi penerapannya, yakni *smart village* diimplementasikan pada level desa (Bahirah, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan Permendes No. 2 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa desa yang melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan disebut dengan Desa Mandiri.

Menurut Menteri Desa PDTT Halim Iskandar menyebutkan bahwa desa mandiri merupakan desa yang mempunyai akses dan ketersediaan pelayanan dasar, infrastruktur memadai, serta pelayanan publik dan pemerintahan yang prima. Desa mandiri adalah desa yang memiliki Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75 dari skala 1-100 (Damarjati, 2021). Berikut adalah data terakhir dari survei Kemendes PDTT tahun 2021, dari 74.957 desa, hanya 3.269 desa yang berstatus sebagai desa mandiri. Tabel I-1 berikut menunjukkan rinciannya.

Tabel I-1 Survei Kemendes PDTT tahun 2021

(Sumber: Damarjati, 2021)

Jenis Desa	Jumlah Desa
Desa Mandiri	3.269
Desa Maju	15.321
Desa Berkembang	38.083
Desa Tertinggal	12.635
Desa Sangat Tertinggal	5.649
Total Desa: 74.957	

Berdasarkan data pada Tabel I-1 diketahui bahwa desa tertinggal dan desa berkembang masih mendominasi di Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan bagi desa-desa yang tertinggal. Berdasarkan pada Permendesa Nomor 2 Tahun 2016 nilai untuk mencapai desa mandiri adalah lebih dari 0,8155.

Desa Rancamanyar merupakan desa di daerah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung yang telah termasuk ke dalam desa mandiri dengan nilai mencapai 0.923, hal ini menunjukkan bahwa Desa Rancamanyar telah mencapai indeks desa mandiri. Akan tetapi jika ditinjau dalam aspek pembangunan nilai *Sustainable Development Goals* (SDGs), Tabel I-2 berikut menunjukkan nilai SDGs dari Desa Rancamanyar.

Tabel I-2 Score SDGs

(Sumber: Kemendesa, 2023)

No.	Goals SDGs	Score
1.	Desa Tanpa Kemiskinan	78,78
2.	Desa Tanpa Kelaparan	33,33
3.	Desa Sehat dan Sejahtera	41,19
4.	Pendidikan Desa Berkualitas	28,90
5.	Keterlibatan Perempuan Desa	33,33
6.	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	63,93
7.	Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan	99,53
8.	Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	22,27
9.	Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan	0,00
10.	Desa Tanpa Kesenjangan	27,51
11.	Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman	32,20
12.	Konsumsi Produksi Desa Sadar Lingkungan	0,00

No.	Goals SDGs	Score
13.	Desa Tanggap Perubahan Iklim	0,00
14.	Desa Peduli Lingkungan Laut	0,00
15.	Desa Peduli Lingkungan Darat	0,00
16.	Desa Damai Berkeadilan	72,67
17.	Kemitraan untuk Pembangunan Desa	0,00
18.	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	0,00

Nilai *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang tercantum dalam Tabel I-2 khususnya pada tujuan 3 yakni desa sehat dan sejahtera hanya berhasil meraih nilai 41,19. Berdasarkan tingkat keberhasilan ini, nilai SDGs Desa Rancamanyar masih sangat rendah maka diperlukan upaya peningkatan untuk meraih nilai maksimum SDGs di desa tersebut.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tahun 2022-2027 menjadi acuan penting bagi Desa Rancamanyar dalam menjalankan setiap programnya. Salah satu fokus dalam RPJM Desa ini adalah peningkatan kualitas layanan kesehatan agar terselenggara secara optimal dan efisien.

Namun, fakta menunjukkan bahwa tantangan kesehatan masih cukup besar. Sebagaimana dinyatakan dalam data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, prevalensi *stunting* di Kabupaten Bandung mencapai 31,1%. Nilai tersebut jauh melampaui rata-rata prevalensi *stunting* di Provinsi Jawa Barat dan tingkat nasional, yang masing-masing sebesar 24,5% dan 24,4% (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2022).

Pada tahun 2018 berdasarkan data cakupan program intervensi percepatan pencegahan dan penanggulangan *stunting* pada 280 desa di kabupaten bandung, Desa Rancamanyar memiliki angka prevalensi *stunting* dengan nilai 10,63%, akan tetapi jumlah anak *stunting* (pendek & sangat pendek) mencapai 294 anak. Data tersebut menunjukkan bahwa penyebab nilai yang rendah pada tujuan 2 dan 3 SDGs yang terdapat pada Tabel I-2. Oleh karena itu perlu adanya tindakan dalam penurunan angka *stunting*. Hal tersebut di dukung oleh Perbup Bandung Nomor 74 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* sebagai upaya percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa. Hal tersebut juga selaras dengan strategi nasional dalam rangka

percepatan penurunan *stunting* yang tercantum dalam Pepres Nomor 72 Tahun 2021.

Stunting adalah kondisi malnutrisi kronis yang ditandai dengan tinggi badan kurang dari -2 standar deviasi dari acuan global WHO (*World Health Organization*) untuk anak-anak dibandingkan dengan anak seusia mereka. *Stunting* mengalami gangguan pertumbuhan linear yang ditandai oleh kurangnya kualitas nutrisi selama 1000 hari pertama kehidupan (R. D. Wulandari dkk., 2022).

Hal ini menimbulkan masalah yang dihadapi oleh desa terkait dengan kualitas pelayanan kesehatan di Desa Rancamanyar. Konsep *smart village* dapat dijadikan solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik desa.

Smart village menggunakan teknologi informasi sebagai pemberdayaan masyarakat pedesaan, menguatkan lembaga-lembaga, serta meningkatkan kesejahteraan di bidangnya (Aziiza & Susanto, 2020). Tujuan dari *Smart village* adalah mewujudkan pemberdayaan, penguatan institusi, dan peningkatan kesejahteraan penduduk melalui penggunaan teknologi informasi (Herdiana, 2019).

Salah satu cara untuk mewujudkan penerapan konsep *smart village* adalah memberikan gambaran kepada pemerintah dengan membuat *blueprint*. Pendekatan *enterprise architecture* dapat membantu dalam penyusunan strategis teknologi informasi berupa *blueprint* (Thirasakthana & Kiattisin, 2021).

Perancangan *enterprise architecture* merupakan cara yang tepat untuk membantu penerapan Arsitektur SPBE pada pemerintahan sehingga dapat meningkatkan kinerja pada pelayan publik. Hal ini didukung oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk menyelenggarakan birokrasi yang terpadu dan berkinerja tinggi, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik (Afri dkk., 2020). Melalui penerapan *enterprise architecture*, diharapkan dapat mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan di Desa Rancamanyar.

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu tentang SPBE dan *smart village*. Penelitian pertama oleh Anindita dkk (2022), terkait implementasi *enterprise architecture* untuk penerapan *smart village* salah satunya di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Permasalahan yang diangkat adalah pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan *framework* IGEA (*Indonesian Government Enterprise Architecture Framework*) dikembangkan untuk membangun *enterprise architecture* di tingkat pemerintah Indonesia yang mendukung pengembangan layanan TI yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, merancang dan membangun rencana arsitektur bisnis dengan menerapkan konsep *smart village* untuk mengatasi permasalahan pelayanan publik dan meningkatkan kualitas sumber daya perangkat keras dan pengelolaan yang bertanggung jawab dalam pelayanan publik. Hasil dari penelitian Anindita dkk (2022) adalah perancangan *enterprise architecture* berupa *blueprint* yakni, *architecture principle, goals, vision and mission, policy and regulation, solution concept diagram, and improvement of twelve business processes, and public service catalog* (Anindita dkk., 2022).

Penelitian kedua terkait SPBE adalah penelitian dari Wulandari dkk (2021). Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi perlu melakukan standarisasi terhadap perancangan SPBE agar dapat terimplementasi dan terintegrasi dengan baik. Salah satu kerangka kerja yang bisa digunakan untuk merancang arsitektur SPBE yaitu menggunakan *enterprise architecture*. Penelitian yang dilakukan Wulandari dkk (2021) memanfaatkan kombinasi antara referensi pada Perpres SPBE dan lampiran rencana induk SPBE nasional serta salah satu komponen utama *framework* EA yaitu TOGAF ADM. Fokus penelitian ini adalah perancangan EA SPBE pada domain layanan SPBE di bagian layanan administrasi. Penelitian Wulandari dkk (2021) menghasilkan keluaran berupa katalog layanan administrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengembangan teknologi di Pemerintahan Kabupaten Sukabumi baik dari kontribusi praktis maupun kontribusi akademik (Wulandari dkk., 2021).

Oleh karena itu, dengan kedua penelitian terdahulu tersebut sebagai pendukung dari penelitian ini maka penting mewujudkan penerapan *smart village* agar desa dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang terpadu dan berkinerja tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang *enterprise architecture* dari domain arsitektur yang terdapat di SPBE dengan keluaran diagram, katalog, dan matriks. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pelayanan kesehatan melalui penggunaan teknologi informasi sehingga dapat mewujudkan penerapan konsep *smart village*.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana perancangan *enterprise architecture* berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai pengembangan *smart village* pada Desa Rancamanyar.

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah merancang *enterprise architecture* dengan menghasilkan *blueprint* sesuai dengan amanah Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai pengembangan *smart village* pada Desa Rancamanyar.

I.4 Batasan Penelitian

Batasan pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini berfokus pada perancangan *enterprise architecture* pada domain SPBE sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018.
2. Ruang lingkup dan fokus penelitian dilakukan sesuai dengan program RPJM Desa Rancamanyar.
3. Perancangan *enterprise architecture* hanya sampai pada tahap merancang dan tidak sampai tahap implementasi.
4. Perancangan ini dibatasi berdasarkan indikator *health services* pada dimensi *smart village* model.

I.5 Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini adalah:

1. Membantu Desa Rancamanyar dalam analisis, perancangan, serta rancangan *enterprise architecture* SPBE yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pengembangan IT.
2. Mendapatkan wawasan ilmu pengetahuan tentang perancangan *enterprise architecture* SPBE untuk penerapan *smart village*.
3. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi perancangan *enterprise architecture* SPBE selanjutnya dalam melakukan penerapan *smart village*.